

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERBARU(LIST OF NEW LAWS AND REGULATIONS) April 2026

Jenis Peraturan / Types of Regulation	Nomor / Number	Judul	Title
PERIODE II BULAN APRIL 2026 (SECOND PERIOD OF APRIL 2026)			
RUU		PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA	<i>Protection of Domestic Workers</i>
		PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	<i>Protection of Witnesses and Victims</i>
		PENGELOLAAN PERUBAHAN IKLIM	<i>Climate Change Management</i>
		MINYAK DAN GAS BUMI	<i>Oil and Gas</i>
PP	16/2026	PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	<i>Implementing Regulation of Law Number 6 of 2014 on Villages</i>
	11 Tahun 2026	PENEMPATAN DANA PADA BANK DAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	<i>Placement of Funds in Banks and the Implementation of Authority in Implementing Banking Restructuring Programs by the Deposit Insurance Corporation</i>
	8 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN	<i>Amendment to Regulation of the Government Number 23 of 2021 on the Organization of Forestry</i>
	7 Tahun 2026	PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN	<i>Implementing Regulation of Law Number 22 of 2019 on Sustainable Agricultural Cultivation Systems</i>
PERPRES	14/2026	PERCEPATAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PASCAPANEN DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL	<i>Acceleration of the Implementation of Post-Harvest Infrastructure Provision for National Food Security</i>
	13/2026	PENGELOLAAN KESEHATAN	<i>Health Management</i>
	12 Tahun 2026	PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA	<i>Granting of Sports Awards</i>
	11 Tahun 2026	SURVEI HIDROGRAFI DAN PEMETAAN HIDROGRAFI NASIONAL	<i>Hydrographic Survey and National Hydrographic Mapping</i>
	8 Tahun 2026	RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2026-2029	<i>National Action Plan for the Prevention and Mitigation of Violent Extremism Leading to Terrorism for 2026–2029</i>
KEPPRES	4 Tahun 2026	SATUAN TUGAS PERCEPATAN PROGRAM PEMERINTAH UNTUK Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	<i>Task Force for the Acceleration of Government Programs to Support Increased Economic Growth</i>
INPRES	4 Tahun 2026	PENGADAAN DAN PENGELOLAAN GABAH/BERAS DALAM NEGERI SERTA PENYALURAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH TAHUN 2026-2029	<i>Procurement and Management of Domestic Paddy/Rice and Distribution of Government Rice Reserves for 2026–2029</i>
	3 Tahun 2026	PENGADAAN DAN PENGELOLAAN JAGUNG DALAM NEGERI SERTA PENYALURAN CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH TAHUN 2026-2029	<i>Procurement and Management of Domestic Corn and Distribution of Government Corn Reserves for 2026–2029</i>
	2 Tahun 2026	PERCEPATAN SWASEMBADA PANGAN BIDANG PERTANIAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL DAN KEMANDIRIAN BANGSA	<i>Acceleration of Agricultural Food Self-Sufficiency to Achieve National Resilience and Independence</i>
PERMEN PEMUDA DAN OLAHRAGA	9 Tahun 2026	INDUSTRI OLAHRAGA	<i>Sports Industry</i>
	8 Tahun 2026	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI	<i>Development and Promotion of High-Performance Sports</i>
	7 Tahun 2026	PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	<i>Promotion of Sports Culture</i>
	6 Tahun 2026	PELAYANAN KEPEMUDAAN	<i>Youth Services</i>
PERMEN KEUANGAN	21/2026	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA SEMUA INSTANSI PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	<i>Types and Tariffs of Non-Tax State Revenue of a Volatile Nature Applicable to All Non-Tax State Revenue Collecting Agencies</i>
PERMEN KETENAGAKERJAAN	6 Tahun 2026	PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	<i>Implementation of the Government Internal Control System and Risk Management at the Ministry of Manpower</i>
	5 Tahun 2026	STATUTA POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN	<i>Statute of the Polytechnic of Manpower</i>
PERMEN PERDAGANGAN	9 Tahun 2026	IMPOR BARANG YANG DIHASILKAN DARI KEGIATAN USAHA DENGAN KERJA PAKSA	<i>Import of Goods Produced Through Forced Labor</i>
	8 Tahun 2026	PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR BINATANG HIDUP DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK	<i>Revocation of Regulation of the Minister of Trade Number 10 of 2020 on Temporary Prohibition of Importation of Live Animals from the People's Republic of China</i>
	7 Tahun 2026	SEKOLAH PERDAGANGAN	<i>Trade School</i>
PERMEN PEKERJAAN UMUM	8 Tahun 2026	JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	<i>Legal Documentation and Information Network of the Ministry of Public Works</i>
	7 Tahun 2026	SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	<i>Government Agency Performance Accountability System at the Ministry of Public Works</i>
	6 Tahun 2026	KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2026-2030	<i>National Policy and Strategy for the Implementation of Drinking Water Supply Systems for 2026–2030</i>
PERMEN KEHUTANAN	7 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PADA KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM, DAN TAMAN BURU	<i>Amendment to Regulation of the Minister of Forestry Number 27 of 2025 on Utilization of Environmental Services in Nature Reserves, Conservation Areas, and Hunting Parks</i>
	6 Tahun 2026	TATA CARA PERDAGANGAN KARBON MELALUI OFFSET EMISI GAS RUMAH KACA SEKTOR KEHUTANAN	<i>Procedures for Carbon Trading Through Greenhouse Gas Emission Offsets in the Forestry Sector</i>
	5 Tahun 2026	TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN	<i>Procedures for Granting Performance Allowances to Employees within the Ministry of Forestry</i>
	4 Tahun 2026	PENYELENGGARAAN KEARSIPAN KEMENTERIAN KEHUTANAN	<i>Records Management within the Ministry of Forestry</i>
RANCANGAN PERMEN KEHUTANAN		PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL	<i>Social Forestry Management</i>

PERMEN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS	<i>Amendment to Regulation of the Minister of Housing and Settlement Areas Number 10 of 2025 on the Implementation of Housing Construction Assistance and Provision of Special Housing</i>
	3 Tahun 2026	KULTUR BERINTEGRITAS PEGAWAI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	<i>Integrity Culture of Employees within the Ministry of Housing and Settlement Areas</i>
	2 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG KEMUDAHAN DAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENDAHULUAN RENDAH	<i>Amendment to Regulation of the Minister of Housing and Settlement Areas Number 9 of 2025 on Housing Finance Facilitation and Assistance for Low-Income Communities</i>
PERMEN PERTANIAN	9 Tahun 2026	KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	<i>Classification of Technical Implementation Units for Agricultural Modernization within the Agency for Agricultural Assembly and Modernization</i>
	8 Tahun 2026	KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERAKITAN DAN PENGUJIAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	<i>Classification of Technical Implementation Units for Livestock and Animal Health Assembly and Testing within the Agency for Agricultural Assembly and Modernization</i>
	7 Tahun 2026	KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PANGAN LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	<i>Classification of Technical Implementation Units for Food Crops Assembly and Testing within the Agency for Agricultural Assembly and Modernization</i>
PERMEN DALAM NEGERI	11 Tahun 2026	DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT	<i>Tax Base for Motor Vehicle, Motor Vehicle Title Transfer Fee, and Heavy Equipment Tax</i>
	10 Tahun 2026	SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	<i>Information Security Management System for Population Administration</i>
	9 Tahun 2026	ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM	<i>Organizational Structure and Work Procedures of the Secretariat of the Honorary Council of General Elections Organizers</i>
	8 Tahun 2026	PEDOMAN TATA KEHIDUPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	<i>Code of Conduct for Cadets of the Institute of Public Administration</i>
	7 Tahun 2026	PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK	<i>Issuance of Child Identity Cards</i>
PERMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	10 Tahun 2026	PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH	<i>Technical Guidelines for Granting Professional Allowances, Special Allowances, and Additional Income for Regional Civil Servant Teachers</i>
PERMEN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	3 Tahun 2026	PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	<i>Formation of Legal Instruments within the Coordinating Ministry for Infrastructure and Regional Development</i>
PERMEN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN	3 Tahun 2026	SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN	<i>Integrated Government Internal Control System within the Coordinating Ministry for Law, Human Rights, Immigration, and Corrections</i>
RANCANGAN PERMEN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL		PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN	<i>Handling and Resolution of Land Cases</i>
KEPMEN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	177/2026	RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI TAHUN 2025-2029	<i>Master Plan for the Development of Indonesian National Work Competency Standards in the Communication and Information Sector for 2025-2029</i>
	127/2026	INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MENDUNG MUATAN DISINFORMASI DAN/ATAU UJARAN KEBENCIAN	<i>Electronic Information and/or Electronic Documents Containing Disinformation and/or Hate Speech</i>
KEPMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	25/2026	PEDOMAN PENENTUAN LOKASI PENGELOLAAN KARBON BIRU	<i>Guidelines for Determining Locations for Blue Carbon Management</i>
	24/2025	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN UJUNGNEGORO KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH	<i>Conservation Area in Ujungnegoro Waters, Batang Regency, Central Java Province</i>
KEPMEN KESEHATAN	HK.01.07/MENKES/301/2026	PENCANTUMAN LABEL GIZI DAN PESAN KESEHATAN PADA PANGAN OLAHAN SIAP SAJI	<i>Nutritional Labeling and Health Messages on Ready-to-Serve Processed Food</i>
KEPMEN PERTANIAN	287/Kpts/HK.150/M/04/2026	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 708/KPTS/PK.310/M/12/2024 TENTANG STATUS SITUASI PENYAKIT HEWAN	<i>Amendment to Decree of the Minister of Agriculture Number 708/KPTS/PK.310/M/12/2024 on Animal Disease Status</i>
	267/Kpts./HK.150/M/03/2026	PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025-2029	<i>Business Process Map of the Ministry of Agriculture for 2025-2029</i>
	206/Kpts./HK.150/M/02/2026	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 70/KPTS./OT.050/M/02/2025 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN	<i>Amendment to Decree of Minister of Agriculture Number 70/KPTS./OT.050/M/02/2025 on Plant Variety Protection Commission</i>
KEPMEN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23/KPTS/M/2026	BESARAN HARGA JUAL, LUAS LANTAI, SUKU BUNGA, DAN JANGKA WAKTU KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH UNTUK SATUAN RUMAH SUSUN DALAM PELAKSANAAN KREDIT/PEMBIAYAAN PERUMAHAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN	<i>Determination of Selling Price, Floor Area, Interest Rate, and Loan/Financing Tenor for Apartment Units under the Implementation of Housing Loan/Financing for Housing Financing Liquidity Facility</i>
KEPMEN KEUANGAN	20/MK/BC/2026	DAFTAR BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR	<i>List of Goods Prohibited from being Exported Based on Regulation of the Minister of Trade Number 22 of 2023 on Goods Prohibited from being Exported, as Amended Several Times, Most Recently by Regulation of the Minister of Trade Number 6 of 2026 on the Fourth Amendment to Regulation of the Minister of Trade Number 22 of 2023 on Goods Prohibited from being Exported</i>
	19/MK/BC/2026	DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR	<i>List of Goods Restricted from being Exported Based on Regulation of the Minister of Trade Number 23 of 2023 on Export Policies and Arrangements, as Amended Several Times, Most Recently by Regulation of the Minister of Trade Number 5 of 2026 on the Fourth Amendment to Regulation of the Minister of Trade Number 23 of 2023 on Export Policies and Arrangements</i>
KEPMEN PERHUBUNGAN	KM 83/2026	BESARAN BIAYA TAMBAHAN (SURCHARGE) YANG DISEBABKAN ADANYA FLUKTUASI BAHAN BAKAR (FUEL SURCHARGE) TARIF PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI	<i>Amount of Additional Charge (Surcharge) Due to Fuel Price Fluctuations (Fuel Surcharge) for Passenger Tariffs for Economy Class Services of Domestic Scheduled Commercial Air Transportation</i>
KEPMEN ESDM	149.K/MG.03/MEM.M/2026	HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN MARET 2026	<i>Indonesian Crude Oil Price for March 2026</i>
	145.K/MB.01/MEM.B/2026	HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK PERIODE KEDUA BULAN APRIL TAHUN 2026	<i>Metal Mineral Reference Price and Coal Reference Price for the Second Period of April 2026</i>
	144.K/MB.01/MEM.B/2026	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 268.K/MB.01/MEM.B/2025 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PENJUALAN KOMODITAS MINERAL LOGAM DAN BATUBARA	<i>Amendment to Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 268.K/MB.01/MEM.B/2025 on Benchmark Pricing Guidelines for Metal Mineral and Coal Commodities</i>
	113.K/EK.05/MEM.E/2026	PENAHAPAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI	<i>Phased Utilization of Biofuels</i>
KEPMEN PERDAGANGAN	624/2026	HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR	<i>Export Benchmark Prices and Reference Prices for Mining Products Subject to Export Duties</i>

KEPMEN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BP2MI	723/2026	PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN HELP DESK DAN LOUNGE PEKERJA MIGRAN INDONESIA	<i>Technical Guidelines for the Organization and Management of Help Desk and Lounge for Indonesian Migrant Workers</i>
SKB KEMENTERIAN DAN LEMBAGA	HK.01.08/MENKES/174/2026; 1/MenPPA/SKB/III/2026; 1/KB/2026; 3/SKB/Kemendukbangga/2026; 400.5-416; 203; 37 /HUK/2026; 103; KB/1/III/2026	KESEHATAN JIWA ANAK	<i>Child Mental Health</i>
SE MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	11 Tahun 2026	PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BERUPA KERJA DARI KANTOR DAN KERJA DARI RUMAH DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	<i>Adjustment of Official Duties through Work from Office and Work from Home at the Ministry of Primary and Secondary Education</i>
SE MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS	1 Tahun 2026	TRANSFORMASI BUDAYA KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	<i>Transformation of Employee Work Culture within the Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency</i>
SE MENTERI DALAM NEGERI	900.1.13.1/3764/SJ	PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI	<i>The Provision of Fiscal Incentives in the Form of Exemption from Motor Vehicle Tax and Transfer Fees for Motor Vehicle Ownership for Battery Electric Vehicles</i>
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI	PER-2/BC/2026	PENGOLAHAN KEMBALI ATAU PEMUSNAHAN BARANG KENA CUKAI YANG DIBUAT DI INDONESIA DALAM RANGKA PENGEMBALIAN CUKAI	<i>Reprocessing or Destruction of Excise Goods Produced in Indonesia for Excise Refund Purposes</i>
	PER-1/BC/2026	PENGEMBALIAN CUKAI ATAS PITA CUKAI YANG RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI	<i>Refund of Excise on Damaged or Unused Excise Bands</i>
PERATURAN DIRJEN PAJAK	PER-4/PJ/2026	BADAN ATAU LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO	<i>Entities or Institutions Established or Endorsed by the Government Designated as Recipients of Zakat or Mandatory Religious Contributions Deductible from Gross Income</i>
PERATURAN DIRJEN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA	2 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG RINCIAN KOMPONEN UTAMA BARANG SEKTOR INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA UNTUK PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI	<i>Amendment to Regulation of the Director General of Metal, Machinery, Transportation Equipment, and Electronics Industry Number 6 of 2025 on the Details of Main Components of Goods in the Metal, Machinery, Transportation Equipment, and Electronics Industry Sector for the Calculation of Domestic Component Level (TKDN)</i>
SE DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT	SE-DJPL 4/2026	PENGENAAN TARIF JASA KEPELABUHANAN BERDASARKAN PELAYANAN YANG DIBERIKAN PAS SUNGAI DAN DANAU BAGI KAPAL YANG HANYA BERLAYAR DI PERAIRAN SUNGAI DAN DANAU PADA DIREKTORAT JENDERAL PEHUBUNGAN LAUT	<i>Imposition of Port Service Tariffs Based on Services Rendered River and Lake Passes for Vessels Operating Exclusively in Inland River and Lake Waters under the Directorate General of Sea Transportation</i>
	SE-DK 3/2026		
SE DIRJEN TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RESIKO	01/SE/Dt/2026	PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA	<i>Technical Guidelines for the Implementation of Self-Help Housing Construction Assistance Program</i>
SE DIRJEN STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN	SE-2/SK/2026	TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN PROFESI KEUANGAN PERIODE PELAPORAN TAHUN 2026	<i>Procedures for Submission of Annual Reports of Financial Professions for Reporting Period 2026</i>
	SE-1/SK/2026	TATA CARA PENERAPAN KODE QR PADA LAPORAN PENILAIAN	<i>Procedures for the Application of QR Codes in Appraisal Reports</i>
SE DIRJEN BINA MARGA	06/SE/DB/2026	PEDOMAN METODE GEOFISIKA NONDESTRUKTIF UNTUK PENYELIDIKAN BAWAH PERMUKAAN	<i>Guidelines for Non-Destructive Geophysical Methods for Subsurface Investigation</i>
	05/SE/DB/2026	PEDOMAN PEMODELAN LALU LINTAS UNTUK STUDI KELAYAKAN JALAN DAN JEMBATAN	<i>Guidelines for Traffic Modeling for Road and Bridge Feasibility Studies</i>
	04/SE/DB/2026	PEDOMAN STUDI KELAYAKAN PROYEK JALAN	<i>Guidelines for Road Project Feasibility Studies</i>
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2 Tahun 2026	KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	<i>Code of Ethics of the Audit Board of Indonesia</i>
	1 Tahun 2026	STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA	<i>State Financial Audit Standards</i>
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	2 Tahun 2026	LAYANAN E-KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	<i>E-Performance Services of the National Civil Service Agency</i>
PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL	4 Tahun 2026	SISTEM PENJAMINAN KEAMANAN PANGAN DAN MUTU PANGAN DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL	<i>Food Safety and Quality Assurance System within the National Nutrition Agency</i>
	3 Tahun 2026	PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL	<i>Provision of Legal Aid within the National Nutrition Agency</i>
	2 Tahun 2026	PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL	<i>Development of Integrity Zones Towards Corruption-Free and Clean- and Service-Oriented Bureaucratic Areas within the National Nutrition Agency</i>
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI	6 Tahun 2026	KEBIJAKAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SELAMA MASA TRANSISI	<i>Accreditation Policy for Study Programs During the Transition Period</i>
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	5 Tahun 2026	PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	<i>Settlement of State Losses Incurred by Non-Treasurer Civil Servants or Other Officials within the Nusantara Capital Authority</i>
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	5 Tahun 2026	PENGAWASAN PENGELOLAAN OBAT DAN BAHAN OBAT DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN DAN FASILITAS LAIN	<i>Supervision of the Management of Drugs and Drug Ingredients in Pharmaceutical Service Facilities and Other Facilities</i>
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI	9 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH	<i>Amendment to Regulation of the Board of Governors Number 1 of 2024 on the Implementation of Short-Term Liquidity Financing Based on Sharia Principles for Sharia Commercial Banks</i>
	6 Tahun 2026	JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BANK INDONESIA	<i>Legal Documentation and Information Network within Bank Indonesia</i>
	5 Tahun 2026	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG OPERASI MONETER VALUTA ASING	<i>Third Amendment to Regulation of the Board of Governors Number 21 of 2025 on Foreign Exchange Monetary Operations</i>
	4 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KRITERIA, PERSYARATAN, DAN PENGGUNAAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER	<i>Amendment to Regulation of the Board of Governors Number 18 of 2025 on Criteria, Requirements, and Use of Securities in Monetary Operations</i>
RANCANGAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK		RENCANA BISNIS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	<i>Business Plan of Microfinance Institutions</i>
		PEDOMAN PERLAKUAN AKUNTANSI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK	<i>Guidelines on Accounting Treatment for Issuers or Public Companies</i>
RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN		GRUP KEUANGAN	<i>Financial Conglomerates</i>
		INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DAN DANA PENSUN	<i>Integrity of Financial Reporting of Insurance Companies, Guarantee Institutions, and Pension Funds</i>
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK	<i>Preparation of Financial Statements of Issuers or Public Companies</i>

		PEDOMAN PENERBITAN DAN PELAPORAN EFEK BERAGUN ASET BERBENTUK SURAT PARTISIPASI DALAM RANGKA PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN	<i>Guidelines for Issuance and Reporting of Asset-Backed Securities in the Form of Participation Units for Secondary Housing Financing</i>
		PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA	<i>Assessment of the Soundness of Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions</i>
SE DIREKSI KSEI	SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0426	MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGGUNAAN SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)	<i>Mechanisms and Requirements for the Use of the Integrated Investment Management System (S-Invest)</i>
SURAT DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN/KEPALA INSPEKTUR TAMBANG	B-3288/MB.07/DBT.KP/2026	PEMBELAJARAN KASUS KECELAKAAN TAMBANG TRIWULAN I TAHUN 2026 DALAM RANGKA PENINGKATAN KEWASPADAAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA KESELAMATAN PERTAMBANGAN	<i>Lessons Learned from Mining Accident Cases in Quarter 1 of 2026 to Enhance Vigilance in Improving Mining Safety Performance</i>
PERIODE I BULAN APRIL 2026 (FIRST PERIOD OF APRIL 2026)			
PP	4 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA	<i>Amendment to Regulation of the Government Number 28 of 2022 on the Management of State Receivables by the State Receivables Affairs Committee</i>
RPP		PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT	<i>Amendment to Regulation of the Government Number 53 of 2017 on Tax Treatment for Upstream Oil and Gas Business Activity through Gross-Split Production Sharing Contracts</i>
RANCANGAN PERPRES		PETA JALAN KECERDASAN ARTIFISIAL NASIONAL TAHUN 2026-2029	<i>National Artificial Intelligence Roadmap for 2026–2029</i>
PERMEN KETENAGAKERJAAN	4 Tahun 2026	INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2025-2029	<i>Performance Indicators of the Ministry of Manpower for 2025–2029</i>
PERMEN KEUANGAN	19/2026	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI PUPUK	<i>Second Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 68/PMK.02/2016 on Procedures for the Provision, Disbursement, and Accountability of Fertilizer Subsidy Funds</i>
	18/2026	ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<i>Organization and Work Procedures of Vertical Agencies of the Directorate General of Taxes</i>
	16/2026	PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI	<i>Utilization of Revenue Sharing Funds from Forestry Natural Resources – Reforestation Fund</i>
	15/2026	TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM/DANA BAGI HASIL ATAU DANA DESA DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH	<i>Procedures for the Distribution of General Allocation Funds/Revenue Sharing Funds or Village Funds in the Context of Accelerating the Physical Development of Red-and-White Village-Level and Subdistrict-Level Cooperatives Retail Outlets, Warehousing, and Supporting Facilities</i>
	14/2026	PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING ATAS IMPOR PRODUK BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE YANG BERASAL DARI INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK, DAN THAILAND	<i>Imposition of Anti-Dumping Import Duties on Imports of Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate Products Originating from India, the People’s Republic of China, and Thailand</i>
RANCANGAN PERMEN KEUANGAN		ANGKUT TERUS ATAU ANGKUT LANJUT BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR	<i>The Transit and Transshipment of Imported and Exported Goods</i>
PERMEN UMKM	1 Tahun 2026	PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KEMUDAHAN PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA KEMENTERIAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	<i>General Guidelines on the Organization of Government Assistance for Facilitating the Protection and Empowerment of Micro-, Small-, and Medium Scales Enterprises within the Ministry of Micro-, Small-, and Medium Scales Enterprises</i>
PERMEN TRANSMIGRASI	3 Tahun 2026	TRANSMIGRASI PATRIOT	<i>Patriot Transmigration</i>
	2 Tahun 2026	PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2026	<i>Organization of Deconcentration and Co-Administration Tasks in the Transmigration Sector for Fiscal Year 2026</i>
PERMEN AGAMA	7 Tahun 2026	SATU DATA KEMENTERIAN AGAMA	<i>One Data of the Ministry of Religious Affairs</i>
	6 Tahun 2026	PEMBENTUKAN FAKULTAS JURUSAN DAN PROGRAM STUDI SERTA SEBUTAN GELAR DAN TATA CARA PENULISAN GELAR DALAM RUMPUN ILMU AGAMA	<i>Establishment of Faculties, Departments, and Study Programs, as well as Degree Nomenclature and Procedures for the Writing of Academic Degrees within the Religious Sciences Cluster</i>
PERMEN PEMUDA DAN OLARHAGA	5 Tahun 2026	ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA USAHA KEOLAHRAGAAN	<i>Organization and Work Procedures of the Institute for the Management of Sports Enterprises</i>
PERMEN PERINDUSTRIAN	7 Tahun 2026	PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 08/M-IND/PER/3/2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	<i>Revocation of Regulation of the Minister of Industry Number 08/M-Ind/Per/3/2017 on Procedures for the Appointment and Dismissal of Vocational High School Principals within the Ministry of Industry</i>
	6 Tahun 2026	PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI PERALATAN ELEKTRONIKA	<i>Implementation of the Indonesian National Qualifications Framework in the Electronics Equipment Industry Sector</i>
	5 Tahun 2026	PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN ATAU BAHAN PENOLONG	<i>Center for the Provision of Raw Materials and/or Auxiliary Materials</i>
	4 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK GULA KRISTAL RAFINASI SECARA WAJIB	<i>Amendment to Regulation of the Minister of Industry Number 2 of 2025 on the Mandatory Enforcement of the Indonesian National Standard for Refined Crystal Sugar</i>
PERMEN PERDAGANGAN	6 Tahun 2026	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR	<i>Fourth Amendment to Regulation of the Minister of Trade Number 22 of 2023 on Goods Prohibited from Export</i>
	5 Tahun 2026	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR	<i>Fourth Amendment to Regulation of the Minister of Trade Number 23 of 2023 on Export Policy and Provisions</i>
	4 Tahun 2026	PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DI BIDANG PERDAGANGAN	<i>Competency Development through an Integrated Learning System in the Trade Sector</i>
PERMEN KOPERASI	3 Tahun 2026	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI	<i>Implementation of Risk Management within the Ministry of Cooperatives</i>
	2 Tahun 2026	PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI	<i>Organization of the Government Internal Control System within the Ministry of Cooperatives</i>
	1 Tahun 2026	PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI	<i>Gratification Control within the Ministry of Cooperatives</i>
PERMEN PARIWISATA	4 Tahun 2026	PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA	<i>Implementation of the Provision of Performance Allowances for Employees within the Ministry of Tourism</i>
	3 Tahun 2026	PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN PARIWISATA	<i>Organization of Deconcentration and Co-Administration Tasks within the Ministry of Tourism</i>
PERMEN KESEHATAN	4 Tahun 2026	PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGI DOKTER DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER	<i>Revocation of Regulation of the Minister of Health Number 5 of 2014 on Clinical Practice Guidelines for Physicians in Primary Health Care Facilities</i>

	3 Tahun 2026	PENANGGULANGAN PENYAKIT	<i>Disease Control</i>
	2 Tahun 2026	PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	<i>Guidelines on the Nomenclature of Regional Apparatus and Work Units within Regional Apparatus Which Organizes Government Affairs in the Health Sector</i>
PERMEN PERHUBUNGAN	PM3/2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 59 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN	<i>Amendment to Regulation of the Minister of Transportation Number PM 59 of 2021 on the Organization of Business Services Related to Water Transportation</i>
PERMEN KEBUDAYAAN	2 Tahun 2026	ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAN KANTOR PELESTARIAN KEBUDAYAAN	<i>Organization and Work Procedures of Cultural Preservation Centers and Cultural Preservation Offices</i>
PERMEN ATR/KEPALA BPN	4 Tahun 2026	ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK AGRARIA STPN	<i>Organization and Work Procedures of the Agrarian Polytechnic (STPN)</i>
PERMEN SEKRETARIS NEGARA	2 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	<i>Amendment to Regulation of the Minister of State Secretariat Number 11 of 2024 on the Organization and Work Procedures of the Ministry of State Secretariat</i>
PERMEN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	1 Tahun 2026	TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	<i>Procedures for the Formulation of Regulation of the Coordinating Minister within the Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs</i>
PERMEN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN	2 Tahun 2026	PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	<i>Management of Information and Documentation Services</i>
RANCANGAN PERMEN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN		PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	<i>Ninth Amendment to Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs Number 7 of 2021 on Amendment to the List of National Strategic Projects</i>
KEPMEN PERDAGANGAN	561/2026	DAFTAR MEREK REFINED, BLEACHED, AND DEODORIZED PALM OLEIN DALAM KEMASAN BERMEREK DAN DIKEMAS DENGAN BERAT NETTO KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 25 KG	<i>List of Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein Brands in Branded Packaging and Packaged with a Net Weight of Less Than and or Equal to 25 Kg</i>
	560/2026	HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM	<i>Export Reference Prices and Reference Prices for Agricultural and Forestry Products Subject to Export Duties and Public Service Agency Service Tariffs</i>
	559/2026	HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR	<i>Export Reference Prices and Reference Prices for Mining Products Subject to Export Duties</i>
KEPMEN KETENAGAKERJAAN	103/2026	PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI, PEMROGRAMAN KOMPUTER, KONSULTANSI, INFRASTRUKTUR KOMPUTASI, DAN JASA INFORMASI LAINNYA GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTANSI KOMPUTER, DAN AKTIVITAS TERKAIT BIDANG KEAHLIAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SUBBIDANG KNOWLEDGE BASED SYSTEM	<i>Determination of Indonesian National Work Competency Standards in the Category of Telecommunications Activities, Computer Programming, Consultancy, Computing Infrastructure, and Other Information Services, in the Main Group of Programming Activities, Computer Consultancy, and Related Activities in the Field of Artificial Intelligence Expertise. Subfield of Knowledge-Based Systems</i>
KEPMEN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	142/2026	INDIKATOR PENILAIAN YANG MENUNJUKKAN PRODUK, LAYANAN, DAN FITUR YANG MUNGKIN DIGUNAKAN ATAU DIAKSES OLEH ANAK, PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN TINGKAT RISIKO BERDASARKAN ASPEK DAN INDIKATOR, DAN TATA CARA VERIFIKASI TERHADAP HASIL PENILAIAN MANDIRI	<i>Assessment Indicators Demonstrating Products, Services, and Features that May Be Used or Accessed by Children, Technical Guidelines for Risk Level Assessment Based on Aspects and Indicators, and Procedures for Verification of Self-Assessment Results</i>
	140/2026	LAYANAN JEJARING DAN MEDIA SOSIAL YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI PROFIL RISIKO TINGGI	<i>Network Services and Social Media Categorized as High-Risk Profiles</i>
KEPMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	17/SJ Tahun 2026	PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU ATAP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	<i>Integrated One-Stop Service Organizers of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries</i>
	16/SJ Tahun 2026	TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026	<i>Policy Quality Index Measurement Team of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries for 2026</i>
	13/2026	DOKUMEN PERENCANAAN PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT	<i>Planning Documents on the Management of Marine Sedimentation Outputs</i>
KEPMEN PPN/KEPALA BAPPENAS	KEP.25/M.PPN/HK/03/2026	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.70/M.PPN/HK/08/2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KELAPA SAWIT NASIONAL	<i>Amendment to the Decree of the Minister of National Development Planning/Head of the National Development Planning Agency Number Kep.70/M.PPN/HK/08/2025 on the Establishment of the National Palm Oil Task Force</i>
KEPMEN ESDM	135.K/MB.01/MEM.B/2026	HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK PERIODE PERTAMA BULAN APRIL TAHUN 2026	<i>Reference Metal Mineral Prices and Reference Coal Prices for the First Period of April 2026</i>
	95.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI PAPUA BARAT	<i>Mining Areas of West Papua Province</i>
	94.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	<i>Mining Areas of Papua Highlands Province</i>
	93.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	<i>Mining Areas of North Maluku Province</i>
	92.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI PAPUA	<i>Mining Areas of Papua Province</i>
	91.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI PAPUA TENGAH	<i>Mining Areas of Central Papua Province</i>
	90.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI MALUKU	<i>Mining Areas of Maluku Province</i>
	89.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI PAPUA SELATAN	<i>Mining Areas of South Papua Province</i>
	88.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	<i>Mining Areas of Southwest Papua Province</i>
	87.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	<i>Mining Areas of Riau Islands Province</i>
	86.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI LAMPUNG	<i>Mining Areas of Lampung Province</i>
	85.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI RIAU	<i>Mining Areas of Riau Province</i>
	84.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	<i>Mining Areas of Bangka Belitung Islands Province</i>
	83.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	<i>Mining Areas of South Sumatra Province</i>
	82.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	<i>Mining Areas of West Sumatra Province</i>
	81.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA	<i>Mining Areas of North Sumatra Province</i>
	80.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI BENGKULU	<i>Mining Areas of Bengkulu Province</i>
	79.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI JAMBI	<i>Mining Areas of Jambi Province</i>
	78.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI ACEH	<i>Mining Areas of Aceh Province</i>
	77.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	<i>Mining Areas of West Sulawesi Province</i>
	76.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	<i>Mining Areas of Central Kalimantan Province</i>

	75.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	<i>Mining Areas of West Kalimantan Province</i>
	74.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	<i>Mining Areas of South Kalimantan Province</i>
	73.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	<i>Mining Areas of East Kalimantan Province</i>
	72.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	<i>Mining Areas of North Kalimantan Province</i>
	71.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI GORONTALO	<i>Mining Areas of Gorontalo Province</i>
	70.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI SULAWESI UTARA	<i>Mining Areas of North Sulawesi Province</i>
	69.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	<i>Mining Areas of Southeast Sulawesi Province</i>
	68.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	<i>Mining Areas of Central Sulawesi Province</i>
	67.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	<i>Mining Areas of South Sulawesi Province</i>
	66.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	<i>Mining Areas of East Nusa Tenggara Province</i>
	65.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI BANTEN	<i>Mining Areas of Banten Province</i>
	64.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	<i>Mining Areas of West Nusa Tenggara Province</i>
	63.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI JAWA BARAT	<i>Mining Areas of West Java Province</i>
	62.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	<i>Mining Areas of Central Java Province</i>
	61.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	<i>Mining Areas of East Java Province</i>
	60.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI BALI	<i>Mining Areas of Bali Province</i>
	59.K/MB.01/MEM.B/2026	WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	<i>Mining Areas of the Special Region of Yogyakarta</i>
SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN	M/6/HK.04/III/2026	WORK FROM HOME DAN PROGRAM OPTIMASI PEMANFAATAN ENERGI DI TEMPAT KERJA	<i>Work from Home and Workplace Energy Optimization Program</i>
SURAT EDARAN MENTERI PANRB	3 Tahun 2026	PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI INSTANSI PEMERINTAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PERCEPATAN TRANSFORMASI TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	<i>Implementation of Official Duties for State Civil Apparatus Employees within Government Institutions in Support of the Acceleration of Governance Transformation in Public Administration</i>
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI	800.1.5/3349/SJ Tahun 2026	TRANSFORMASI BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	<i>Transformation of the Work Culture of State Civil Apparatus within Regional Governments</i>
SURAT EDARAN MENTERI UMKM	7 Tahun 2026	PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN SECARA FLEKSIBEL DALAM RANGKA MENDUKUNG EFISIENSI ENERGI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	<i>Flexible Implementation of Official Duties in Support of Energy Efficiency for State Civil Apparatus Employees within the Ministry of Micro-, Small-, and Medium Scales Enterprises</i>
SURAT EDARAN MENTERI DIKDASMEN	10 Tahun 2026	PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DALAM UPAYA OPTIMALISASI CAPAIAN BELAJAR DAN PENGUATAN KARAKTER DI SEKOLAH	<i>Implementation of Face-to-Face Learning to Optimize Learning Outcomes and Strengthen Character Education in Schools</i>
SURAT EDARAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MI	366/2026	PENYESUAIAN TAMPILAN DAN FORMAT KARTU PEKERJA MIGRAN INDONESIA ELEKTRONIK (E-KPMI)	<i>Adjustment to the Design and Format of the Indonesian Migrant Worker Electronic Card (E-KPMI)</i>
SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BKPM DAN MENTERI HUKUM, DAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK	4.S; M.HH-1.HH.04.02; 1 Tahun 2026	IMPLEMENTASI PENYESUAIAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA 2025 DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	<i>Implementation of the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification Adjustment in the Organization of Risk-Based Business Licensing</i>
PERATURAN DIRJEN PAJAK	PER-3/PJ/2026	TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHAUAN	<i>Procedures for the Submission, Receipt, and Processing of Tax Returns</i>
	PER-2/PJ/2026	MANAJEMEN KARIER DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<i>Career Management within the Directorate General of Taxes</i>
	PER-1/PJ/2026	TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI MELALUI PERMOHONAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<i>Procedures for the Implementation of Employee Transfers upon Request within the Directorate General of Taxes</i>
KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK	KEP-55/PJ/2026	KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHAUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2025	<i>Tax Policy in Relation to the Implementation of the Core Tax Administration System in the Context of Filing Annual Individual Income Tax Returns for the 2025 Fiscal Year</i>
KEPUTUSAN DIRJEN BADAN PERADILAN UMUM	1115/DJU/SK.TI.1.1/II/202	PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA TINGKAT PUSAT DAN TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2026	<i>Establishment of a Task Force for the Case Tracking Information System at the Central and Appellate Levels within the General Courts for 2026</i>
KEPUTUSAN DIRJEN PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS	24/2026	PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH MODEL IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MENDALAM DAN KODING DAN KECERDASAN ARTIFISIAL	<i>Determination of Educational Units Implementing the Model School Program on Deep Learning, Coding, and Artificial Intelligence</i>
SURAT EDARAN DIRJEN BINA MARGA	08/SE/Db/2026	PENERAPAN SISTEM INFORMASI PAVEMENT QUALITY MANAGEMENT SYSTEM DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	<i>Implementation of the Pavement Quality Management System Information System within the Directorate General of Highways</i>
SURAT EDARAN DIRJEN PENANGGULANGAN PENYAKIT	HK.02.02/C/1602/2026	KEWASPADAAN TERHADAP PENYAKIT CAMPAK BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN	<i>Awareness of Measles for Medical and Health Personnel</i>
SURAT DIRJEN PLANOLOGI KEHUTANAN	S.246/PLA/PKH/GKM.04.04/B/03/2026	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA)	<i>Prevention, Control, and Mitigation of Forest and Land Fires (Karhutla)</i>
PERATURAN BANK INDONESIA	3 Tahun 2026	UANG RUPIAH KERTAS DAN LOGAM	<i>Indonesian Rupiah Banknotes and Coins</i>
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA	8 Tahun 2026	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/28/PADG/2019 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BANK DAN NASABAH	<i>Third Amendment to Regulation of the Members of Board of Governors Number 21/28/PADG/2019 on Monitoring Bank Foreign Exchange Traffic and Customers</i>
	7 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING	<i>Amendment to Regulation of the Members of Board of Governors Number 11 of 2024 on Foreign Exchange Market Transactions</i>
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL	3 Tahun 2026	PENCABUTAN PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL	<i>Revocation of Regulation of the National Library Number 19 of 2017 on Service Standards within the National Library</i>
PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	2 Tahun 2026	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	<i>Public Information Services within the Witness and Victim Protection Agency</i>
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	2 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PEMBELAJARAN APARATUR SIPIL NEGARA	<i>Amendment to Regulation of National Institute of Public Administration Number 1 of 2026 on Competency Testing for Functional Positions in the Field of Capacity Development and Civil Apparatus Learning</i>
PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1 Tahun 2026	PELAKSANAAN PENELAHAHAN, VERIFIKASI, DAN EVALUASI TERHADAP PENYALURAN DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA	<i>Implementation of Review, Verification, and Evaluation of Disaster Mitigation Fund Distribution</i>

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	3 Tahun 2026	KEANGGOTAAN, TUGAS, DAN FUNGSI KELOMPOK KERJA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	<i>Membership, Duties, and Functions of the Working Group of the Business Competition Supervisory Commission</i>
PERATURAN DIREKSI PT BEI	I-A	PENCATATAN SAHAM DAN EFEK BERSIFAT EKUITAS SELAIN SAHAM YANG DITERBITKAN OLEH PERUSAHAAN TERCATAT	<i>Registration of Shares and Equity Securities Other than Shares Issued by Listed Companies</i>
RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN		RENCANA BISNIS BANK UMUM	<i>General Bank Business Plan</i>
KEPUTUSAN DIREKSI PT BEI	Kep-00052/BEI/04-2026	PERUBAHAN KETENTUAN LAPORAN BULANAN KEGIATAN REGISTRASI KEPEMILIKAN SAHAM	<i>Amendment to the Provisions on Monthly Reporting of Share Ownership Registration Activities</i>
KEPUTUSAN DIREKSI PT KPEI	KEP-010/DIR/KPEI/0326	KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF MELALUI KERINGANAN BIAYA PENGGUNAAN FASILITAS TRIPARTY REPO KEPADA PENGGUNA JASA TRI-PARTY AGENT	<i>Policy on Providing Incentives through Fee Reductions for the Use of Triparty Repo Facilities to Tri-Party Agent Service Users</i>
SKB DIREKSI PT BEI DAN PT KSEI	Kep-00047/BEI/03-2026; KEP-0024/DIR/KSEI/0426	PENETAPAN KEPEMILIKAN SAHAM TERKONSENTRASI TINGGI PADA PERUSAHAAN TERCATAT	<i>Determination of Highly Concentrated Share Ownership in Listed Companies</i>
KEPUTUSAN KEPALA BPH MIGAS	024/KOM/BPH.DBBM/2026	PENGENDALIAN PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU JENIS MINYAK SOLAR (GAS OIL) DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN JENIS BENSIN (GASOLINE) RON 90 OLEH BAD AN USAHA PENUGASAN PADA TRANSPORTASI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG	<i>Control over the Distribution of Certain Types of Fuel Oil: Gas Oil and Special Assignment Gasoline (RON 90) by Assigned Business Entities for Motor Vehicle Transportation of Passengers and/or Goods</i>
RANCANGAN RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA BPOM		PEDOMAN VERIFIKASI METODE ANALISIS UJI PENGHITUNGAN MIKROBA DAN UJI MIKROBA SPESIFIK PADA OBAT DAN BAHAN OBAT	<i>Guidelines on Verification of Microbial Testing and Specific Microbial Testing Methods for Drugs and Drug Substances</i>
SURAT EDARAN DIREKSI PT BEI	SE-00004/BEI/03-2026	PENJELASAN ATAS KETENTUAN TERKAIT PENCATATAN SAHAM DAN EFEK BERSIFAT EKUITAS SELAIN SAHAM YANG DITERBITKAN OLEH PERUSAHAAN TERCATAT	<i>Explanatory Notes on Provisions Related to the Registration of Shares and Equity Securities Other than Shares Issued by Listed Companies</i>
SURAT EDARAN DIREKSI PT KPEI	SE-003/DIR/KPEI/0326	KRITERIA EFEK YANG DAPAT DITRANSAKSIKAN MELALUI FASILITAS TRIPARTY REPO	<i>Criteria for Securities Eligible for Trading through Triparty Repo Facilities</i>